



Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn dalam Membina Karakter Jujur Siswa di SMP Negeri 17 Medan

Kristina Pujasari Sitompul¹, Liber Siagian²

^{1,2} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author: ✉ kristina.3213311007@mhs.unimed.ac.id

ABSTRACT

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi, mengingat materi yang dibahas terkait dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan kewarganegaraan yang baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal yang menunjukkan masih rendahnya karakter jujur siswa di SMP Negeri 17 Medan, yang ditunjukkan melalui perilaku seperti mencontek, saling menyalahkan, dan ketidakdisiplinan. Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui implementasi pendidikan antikorupsi dalam membina karakter jujur siswa di SMP Negeri 17 Medan. Mendeskripsikan hambatan dalam penerapan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PPKn, dan siswa siswi SMP Negeri 17 Medan. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 17 Medan telah diintegrasikan dalam pembelajaran PPKn melalui materi, motivasi di awal pembelajaran, dan keteladanan guru. Pendidikan ini berperan penting dalam menanamkan nilai kejujuran, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan waktu, rendahnya partisipasi siswa, dan kurangnya dukungan lingkungan luar sekolah. Pendidikan antikorupsi dalam PPKn terbukti relevan dan strategis dalam membentuk karakter jujur siswa sebagai fondasi mencegah perilaku koruptif sejak dini.

ARTICLE INFO

Article history:

Received

10 April 2025

Revised

29 May 2025

Accepted

10 Juni 2025

Key Word

Pendidikan Antikorupsi, PPKn, Karakter Jujur

How to cite

<https://pusdikra-publishing.com/index.php/josr>



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, bahkan dapat ditelusuri hingga masa kolonial. Sejak kemerdekaan, fenomena korupsi semakin meluas dan telah terintegrasi dalam sistem politik dan ekonomi negara (Zachra et al., 2023). Segala upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi

termasuk memperberat hukuman namun tentang korupsi masih saja sering terdengar.

Korupsi diakui secara luas sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan, masalah ini hingga saat ini belum teratasi secara tuntas dan terus menjadi tantangan serius (Setiadi, 2018). Permasalahan korupsi yang terus terjadi di Indonesia telah mengikis sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara (Simanungkalit & dkk, 2024). Korupsi dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara (Mufidah, 2023). Korupsi bersifat merusak karena keputusan penting sering kali didorong oleh motif tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas (Ummah, 2019). Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan jabatan atau wewenangnya. Tindakan ini merupakan bentuk ketidakjujuran yang seringkali melibatkan praktik suap dan merugikan kepentingan umum (Wahyu Tri Buana Pustha & Fauzan, 2021).

Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi adalah dorongan materialistik, gaya hidup konsumtif, dan sifat serakah yang melekat pada manusia. Individu yang terlibat dalam tindakan korupsi, tidak jarang merupakan mereka yang telah memiliki status sosial dan ekonomi yang cukup, namun tetap terdorong nafsu untuk memperoleh lebih banyak sehingga mengabaikan norma-norma hukum dan etika (Wilhelmus, 2018). Korupsi pada dasarnya didorong oleh sifat tamak dan rakus yang berlebihan. Seseorang cenderung melakukan tindakan korupsi ketika berada dalam lingkungan yang terkontaminasi oleh budaya, pandangan, dan nilai-nilai yang menjustifikasi perilaku koruptif (Wilhelmus, 2018).

Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan upaya-upaya yang efektif, penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini merupakan langkah yang sangat penting. Sebagai upaya, pengenalan budaya antikorupsi harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab (Asyafiq, 2017). Pendidikan tentu menjadi salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Interaksi masyarakat dengan birokrasi pemerintahan yang terjadi terus-menerus, pada umumnya rentan adanya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup birokrasi pemerintahan, tetapi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai lingkungan keluarga hingga ruang publik seperti media sosial. Mengingat tingginya potensi

terjadinya tindakan korupsi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan maksimal untuk mencegahnya (Asyafiq, 2017).

Pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan di sekolah merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang beradab. Pendidikan, sebagai proses pembudayaan, memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada peserta didik, sehingga mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pengembangan diri peserta didik agar mampu berinteraksi dengan cara yang baik dalam masyarakat. Nilai-nilai pendidikan yang diajarkan bertujuan untuk membentuk individu yang berintegritas jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang bersih dari korupsi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk membangun generasi muda yang memiliki kesadaran antikorupsi (Puspito, 2011).

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang berintegritas dan memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kejujuran. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (Asyafiq, 2017). Secara umum pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) memberikan pengetahuan tentang berbagai bentuk korupsi, (2) mengubah sikap masyarakat menjadi lebih antikorupsi, serta (3) mengembangkan kemampuan untuk mencegah melawan korupsi (Asyafiq, 2017).

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran muatan materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Mengingat pendidikan antikorupsi dan pendidikan karakter belum ditetapkan sebagai mata pelajaran tersendiri, maka integrasi materi-materi terkait ke dalam mata pelajaran lain, khususnya Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), menjadi sangat penting (Asyafiq, 2017). Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi dan karakter dapat memperoleh pemahaman peserta didik secara efektif. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, berwawasan luas, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Mata Pelajaran ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (Asyafiq, 2017).

Pengintegrasian nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu upaya efektif

untuk menanamkan kesadaran pentingnya integritas dan etika pada peserta didik. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang korupsi, serta nilai-nilai keteladanan dan kejujuran yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat pada faktor intelektual saja, tetapi keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari proses pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik (Tanjung et al., 2020).

Keberhasilan pendidikan antikorupsi dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam memahami bahaya korupsi, menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas, serta menunjukkan perubahan perilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini meliputi kesadaran peserta didik, kualitas media pembelajaran, dan pemilihan strategi pembelajaran yang efektif (Lova, D, 2022). Implementasi pendidikan antikorupsi secara efektif dapat dimulai dengan mendorong peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan nyata yang menguatkan perilaku antikorupsi. Kegiatan-kegiatan ini dapat berupa kampanye antikorupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta penerapan nilai kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan dalam kehidupan sehari-hari (Triuspita et al., 2020).

Melalui partisipasi aktif, diharapkan peserta didik dapat menjadikan nilai-nilai antikorupsi secara mendalam. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang berkualitas, yaitu individu memiliki karakter yang jujur dan mampu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan negara (Triuspita et al., 2020). Berdasarkan observasi awal dan telah dilakukan wawancara terhadap beberapa siswa kelas VII di SMP Negeri 17 Medan, bahwa siswa masih ada yang menunjukkan karakter jujur. Akan tetapi melalui observasi awal masih ada juga siswa yang melakukan hal-hal yang mengarah kepada perilaku koruptif. Kemudian siswa masih ada yang terlambat datang ke sekolah dikarenakan terlambat bangun pagi, tempat tinggal yang jauh dari rumah, begadang sampai larut malam dan mengerjakan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah.

Di dalam pembelajaran di kelas mencontek juga termasuk hal yang mengarah ke perilaku korupsi, siswa mencontek dikarenakan kurangnya rasa percaya diri akan jawaban yang dibuat, tidak siap menghadapi ujian karena belum belajar, dan takut gagal atau takut salah jawaban. Saling menyalahkan antar teman merupakan hal yang menunjukkan karakter tidak jujur. Hal ini disebabkan karena siswa takut dimarahi jika mengakui kesalahannya dan merasa malu akan apa yang dilakukannya. Oleh karena itu, masih ada siswa yang melakukan hal-hal mengarah pada tindakan koruptif.

Adapun faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan tindakan korupsi, yakni (Damayanti & Ramlah, 2020): 1. *Pressure* (tekanan), 2. *Opportunity* (kesempatan), 3. *Rationalization* (rasionalisasi)

Dalam penguatan nilai karakter kejujuran dan implementasi pendidikan antikorupsi salah satunya bertujuan untuk membentuk perilaku jujur, antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Nilai kejujuran dan pendidikan antikorupsi sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik (Prasetyowati et al., 2022). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pendidikan Antikorupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Dalam Membina Karakter Jujur Siswa di SMP Negeri 17 Medan”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial kompleks, seperti dinamika kehidupan masyarakat, narasi sejarah, pola perilaku individu dan kelompok, struktur dan fungsi organisasi pergerakan sosial, serta sistem hubungan kekerabatan dalam konteks sosial tertentu (Sidik et al., 2019).

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode pengamatan ilmiah yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan cermat, menggunakan prosedur sistematis dan ketat. subjek penelitian ini akan menggunakan teknik quota sampling. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu, Kepala Sekolah, Guru PPKn, Guru Bimbingan Konseling, Siswa siswi kelas VII di SMP Negeri 17 Medan dengan menggunakan teknik *quota sampling*. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pada pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan pengolahan dan penataan data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan temuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan antikorupsi di sekolah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan integritas generasi muda sejak dini. Masa SMP merupakan tahap krusial dalam perkembangan moral dan sikap peserta didik, sehingga

penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sosial sangat tepat dimulai pada usia tersebut. Melalui pendidikan antikorupsi, sekolah tidak hanya berperan sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter.

Hal ini sejalan dengan teori Agus Wibowo (Suyahman & Prasticha, 2021) bahwa Pendidikan antikorupsi adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam proses pembelajaran. pendidikan antikorupsi menjadi bagian penting dalam membentuk karakter peserta didik agar tumbuh menjadi warga negara yang bermoral dan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 17 Medan, diperoleh gambaran bahwa sebagian peserta didik telah memahami pengertian dasar dari pendidikan antikorupsi sebagai suatu bentuk pembelajaran yang bertujuan untuk mencegah perilaku curang dan menanamkan sikap jujur sejak dini. Dalam ruang lingkup penelitian ini, pendidikan antikorupsi berperan signifikan dalam memperkuat karakter jujur peserta didik. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peserta didik memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan religius. Seperti Menurut Thomas Lickona (Reksiana, 2018) karakter merupakan manifestasi dari kualitas batin seseorang yang terwujud dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Ketaatan terhadap nilai-nilai agama, budaya, etika, dan moral menjadi dasar pembentukan karakter yang mulia. Individu dengan karakter mulia memiliki sifat-sifat seperti jujur, rendah hati, dan memiliki empati terhadap sesama. Individu yang melanggar pada nilai-nilai tersebut cenderung menunjukkan perilaku yang tidak terpuji seperti berbohong, sombong, dan tidak bertanggung jawab.

Pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 17 Medan tidak secara eksplisit tercantum sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum nasional. Meskipun demikian, nilai-nilai antikorupsi tetap dapat ditanamkan melalui pengintegrasian ke dalam mata pelajaran lain, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta melalui pendekatan pembelajaran kontekstual dan pembiasaan karakter. Guru memiliki peran strategis dalam menyisipkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ke dalam materi pembelajaran yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, meskipun pendidikan antikorupsi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, substansi dan tujuan dari pendidikan tersebut tetap dapat dicapai melalui proses pembelajaran lintas mata pelajaran dan aktivitas pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Upaya ini juga sejalan

dengan misi pendidikan nasional yang menekankan pada pembentukan manusia berakhlak mulia dan berintegritas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP Negeri 17 Medan, pendidikan antikorupsi diimplementasikan melalui berbagai pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan. Pendekatan pertama dilakukan melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan intrakurikuler, khususnya pada mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam mata pelajaran ini, guru tidak hanya menyampaikan konsep hukum dan kewarganegaraan, tetapi juga menekankan pentingnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik, terutama karena PPKn merupakan mata pelajaran yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan karakter dan pemahaman tentang etika berbangsa dan bernegara. Salah satu strategi yang dilakukan guru PPKn dalam menerapkan pendidikan antikorupsi adalah melalui penekanan nilai kejujuran dan integritas sejak awal pembelajaran. Penekanan ini tidak hanya menjadi pembuka materi, tetapi juga membentuk suasana belajar yang mengedepankan nilai-nilai moral.

Penerapan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PPKn di SMP Negeri 17 Medan dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral sejak awal proses pembelajaran. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memberikan motivasi yang relevan terhadap nilai kejujuran sebelum pembelajaran dimulai. Guru menekankan pentingnya sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari nilai antikorupsi. Penanaman nilai ini juga diwujudkan dalam praktik nyata di lingkungan kelas, seperti melalui kesepakatan bersama yang mengharuskan setiap siswa bersikap jujur, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai bendahara kelas. Selain itu, materi ajar dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang membahas tentang nilai-nilai Pancasila turut menjadi sarana strategis dalam memperkuat internalisasi pendidikan antikorupsi di kalangan peserta didik. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila secara substansial selaras dengan semangat antikorupsi yang menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral.

Misalnya, sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menuntut peserta didik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai religius, termasuk kejujuran sebagai bagian dari akhlak mulia yang diajarkan oleh ajaran agama. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menanamkan prinsip keadilan dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain, yang secara implisit menolak segala

bentuk tindakan koruptif yang merugikan kepentingan bersama. Selanjutnya, sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," mencerminkan pentingnya distribusi keadilan yang merata, yang tentu tidak akan terwujud apabila praktik korupsi masih menjadi bagian dari perilaku sosial.

Integrasi nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PPKn tidak hanya dilakukan dalam bentuk penyampaian materi kognitif, tetapi juga melalui penguatan sikap dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Guru PPKn berperan aktif dalam mengaitkan konsep-konsep dalam Pancasila dengan situasi nyata yang relevan, sehingga peserta didik mampu memahami bahwa perilaku antikorupsi merupakan bagian integral dari implementasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari warga negara yang berintegritas.

Penekanan nilai-nilai moral di awal pembelajaran menjadi elemen kunci dalam membentuk kerangka berpikir peserta didik yang etis dan berkarakter. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai pembuka pembelajaran, tetapi juga sebagai landasan awal yang menuntun siswa dalam memahami pentingnya sikap jujur, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap aktivitas belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penyampaian refleksi, motivasi, maupun diskusi kontekstual sejak awal pembelajaran, guru menciptakan ruang yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran moral siswa. Dengan demikian, nilai-nilai antikorupsi yang ditanamkan sejak awal tidak sekadar menjadi wacana, melainkan terinternalisasi dalam pola pikir dan perilaku nyata siswa, baik di lingkungan sekolah maupun dalam interaksi sosial yang lebih luas. Selain itu, pendidikan antikorupsi juga diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, salah satunya adalah kantin kejujuran. Dalam program ini, siswa dilatih untuk mengambil dan membayar barang tanpa adanya pengawasan langsung dari petugas, sehingga menjadi sarana pembiasaan perilaku jujur secara nyata. Melalui kombinasi pendekatan ini, sekolah berupaya menanamkan nilai-nilai antikorupsi tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai budaya yang hidup dan berkembang dalam lingkungan sekolah.

Dalam penerapan pendidikan antikorupsi di SMP Negeri 17 Medan. Meskipun pendidikan antikorupsi telah diupayakan untuk diintegrasikan dalam proses pembelajaran, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi guru maupun siswa. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek

psikologis, kultural, dan struktural yang mempengaruhi efektivitas penanaman nilai-nilai antikorupsi. Tantangan dan hambatan dalam penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah tidak hanya berasal dari lingkungan pembelajaran itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama lingkungan keluarga. Meskipun guru telah berupaya secara maksimal untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran melalui pembelajaran di kelas dan berbagai aktivitas sekolah, namun pengaruh lingkungan di luar sekolah, khususnya di rumah, seringkali menjadi variabel yang tidak dapat dikendalikan.

Guru tidak selalu memiliki akses atau kendali terhadap bagaimana peserta didik menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan internalisasi nilai antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh efektivitas metode pembelajaran di sekolah, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di sekolah dengan nilai yang diterima di rumah dapat menghambat pembentukan karakter jujur yang diharapkan. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan di sekolah dan peran orang tua di rumah menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan budaya antikorupsi secara berkelanjutan. Hambatan yang signifikan dalam membina karakter jujur pada peserta didik adalah adanya latar belakang yang berbeda-beda dari setiap siswa. Mereka datang ke sekolah dengan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan yang beragam, serta dibentuk oleh pola asuh keluarga yang tidak sama. Perbedaan ini menciptakan tantangan tersendiri bagi guru dalam menyampaikan nilai-nilai kejujuran secara merata.

Tidak semua pendekatan atau metode pembinaan karakter yang diterapkan dapat berhasil secara universal pada setiap individu siswa. Beberapa siswa mungkin dengan cepat merespons pembinaan yang diberikan dan menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif, namun ada pula siswa yang belum mampu menginternalisasi nilai kejujuran meskipun telah dibimbing secara berulang. Kondisi ini menuntut guru untuk memiliki sensitivitas pedagogis yang tinggi serta fleksibilitas dalam mencari dan mencoba berbagai strategi atau pendekatan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan kata lain, pembinaan karakter jujur tidak dapat dilakukan dengan pendekatan satu metode untuk semua, tetapi harus dilakukan melalui proses yang adaptif, penuh kesabaran, dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan peserta didik.

Guru perlu terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas metode yang digunakan, serta mencari pola intervensi baru bagi siswa yang belum menunjukkan perubahan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses

penanaman nilai kejujuran merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan, yang memerlukan komitmen kuat dari pendidik serta dukungan dari lingkungan sekolah dan keluarga. Dalam membina karakter jujur peserta didik, guru tidak hanya dituntut untuk menjadi pengajar, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan pembina karakter yang mampu memahami latar belakang psikologis dan sosial siswa.

Pendekatan yang digunakan harus bersifat humanis dan kontekstual, serta disertai dengan keteladanan nyata dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Keteladanan guru menjadi faktor penting yang dapat menginspirasi dan mempengaruhi siswa dalam menanamkan nilai kejujuran secara lebih mendalam. Selain itu, keterlibatan aktif orang tua dan lingkungan sekitar juga sangat diperlukan agar proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi dapat berlangsung secara konsisten, tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari siswa diluar lingkungan pendidikan formal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi pendidikan antikorupsi dalam mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 17 Medan telah dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ke dalam materi pembelajaran dan kegiatan sekolah. Guru PPKn secara aktif memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya menolak segala bentuk tindakan koruptif, baik dalam kehidupan sekolah maupun kehidupan sehari-hari.

Pendidikan antikorupsi ini mampu membina karakter jujur siswa, meskipun masih ditemukan beberapa kendala seperti siswa yang mencontek, saling menyalahkan, dan belum menunjukkan sikap disiplin secara konsisten. Namun, secara umum telah terjadi peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya nilai kejujuran. Hambatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi antara lain adalah keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi secara mendalam, serta masih minimnya dukungan dari lingkungan luar sekolah, seperti keluarga dan masyarakat.

REFERENCES

- Anjani, N. L., Benty, D. D. N., & Gunawan, I. (2022). Pendidikan Karakter Aspek Nilai Kejujuran pada Satuan Pendidikan Menengah. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(4), 354-367. <https://doi.org/10.17977/um065v2i42022p354-367>
- Damayanti, R. A., & Ramlah, S. (2020). Membangun Konsep Tendency To Fraud

- Dalam Konsep Triangle Fraud (Sintesis Teori Dan Penelitian Empiris Yang Relevan). *Jurnal Mirai Managemnt*, 5(1), 96-113.
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Lova, D, M. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. In *Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno*.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif* (Suraya, F. Hamid, & E. Bassar (eds.); Pertama). Kencana.
- Mufidah, A., & Dkk. (2023). Analisis Proses Hukum Acara Pidana Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Pengadilan Negeri. *Journal Of Social Science Research*, 3(6), 3165.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Luftiah (ed.)).
- Puspito, N. T. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Reksiana. (2018). *Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika*. 3(2), 91-102.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(13), 1-7.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008><http://dx.doi.org/10.1007/s0041201505438><http://dx.doi.org/10.1038/nature08473><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008><http://dx.doi.org/10.1038/s4159>
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*.
- Suyahman, & Prasticha, O. D. (2021). Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pembelajaran PPKn Bagi Siswa SMP N 2 Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun Pelajaran 2019-2020. *Jurnal PPKn*, 9(2), 333-347.
- Tanjung, M., Bungana Br Perangin-Angin, R., & Ruslan, D. (2020). Pengaruh Strategi Pembelajaran Discovery dan Cara Belajar Siswa Terhadap Karakter Siswa. *Repository Universitas Negeri Makassar*, 5(1), 1-17.
- Tripuspita, N., Belladonna, A. P., & Sadiman, A. O. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Antikorupsi di SMK Bina Insan Bangsa Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 9-22.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (Ketiga). Bumi Aksara.
- Wahyu Tri Buana Pustha, F., & Fauzan, A. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 580-585.

<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.599>

Zachra, F., Chaniago, D., Rizqy, M., & Putra, S. (2023). JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 548–553.